

SIKAP MASYARAKAT DESA PULAU BURUNG KEPADA PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM

*Local People Attitude of Pulau Burung Village to Natural Tourism Park
Management*

Putri Festu Sutanti, Setia Budi Peran, dan Dina Naemah

Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *Pulau Burung Nature Tourism Park which is currently managed is a type of mangrove forest which was previously a Nature Reserve which has changed its function in accordance with the wishes of the Tanah Bumbu Regency government and the village community who live in the area, because this area has economic and natural tourism potential and can be developed for the socio-economic interests of the people in and around it, but how the attitude of the community towards the changing functions and management of this area needs to be studied through this research. The purpose of this study is to study the attitude of the village community who live in the tourist park by changing the function of the Nature Reserve where they live into a nature tourism park, and to assess their attitude towards several factors (things) that have been determined in the management of the relevant natural tourism park. Interviews were conducted using a questionnaire to respondents determined by Simple Random Sampling by taking random samples based on the number of houses in the research village. Samples were taken as many as 30 respondents. Attitude analysis was carried out using the Bakhdal and Sinaga scoring and formula. The results showed that the community had a positive attitude towards changing the function of the Nature Reserve into a natural tourism park and also towards the management of the natural tourism park in Pulau Burung Village.*

Keyword: *Attitude; Natural Reserve; Natural Tourism Park*

ABSTRAK. Taman Wisata Alam Pulau Burung yang dikelola saat ini merupakan tipe hutan mangrove yang sebelumnya merupakan Cagar Alam yang berubah fungsinya sesuai dengan keinginan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan masyarakat Desa yang bermukim di areal kawasan tersebut, karena wilayah ini memiliki potensi ekonomis dan wisata alam dan dapat dikembangkan bagi kepentingan sosial-ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitarnya, namun bagaimana sikap masyarakat terhadap berubahnya fungsi dan pengelolaan kawasan ini perlu dikaji melalui penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji sikap masyarakat desa yang bermukim di dalam taman wisata tersebut dengan berubahnya fungsi Cagar Alam tempat mereka bermukim menjadi taman wisata alam, dan menilai sikap mereka terhadap beberapa faktor (hal) yang telah ditetapkan dalam pengelolaan taman wisata alam yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada responden yang ditetapkan secara *Simple Random Sampling* dengan melakukan pengambilan sampel secara acak berdasarkan nomor rumah di desa penelitian. Sampel yang diambil sebanyak 30 responden. Analisis sikap dilakukan menggunakan skoring dan rumus Bakhdal dan Sinaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat beresikap positif terhadap perubahan fungsi Cagar Alam menjadi taman wisata alam dan juga terhadap pengelolaan taman wisata alam di Desa Pulau Burung tersebut.

Kata Kunci: Sikap; Cagar Alam; Taman Wisata Alam

Penulis untuk korespondensi, surel: Putrifestusutanti@gmail.com

PENDAHULUAN

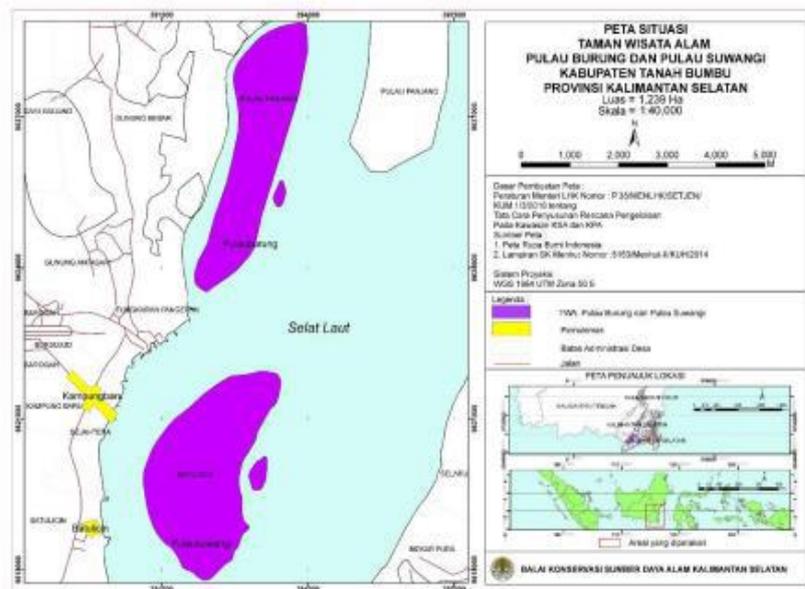
Pengertian Cagar Alam dalam UU No.5 Tahun 1990 disebutkan sebagai kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan tumbuh-tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau adanya ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Karunianti (2019) menyebutkan

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata atau rekreasi alam. Cagar Alam biasanya dilindungi secara ketat, sedangkan Taman Wisata Alam agak longgar karena kawasan dapat dimanfaatkan. Daerah Kalimantan Selatan ada beberapa kawasan yang telah lama ditetapkan pemerintah sebagai Cagar Alam, diantaranya adalah Cagar Alam Pulau Burung dan Cagar Alam

Pulau Sewangi yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu, namun sejak tahun 2019 hutan mangrove yang berfungsi sebagai Cagar Alam di Pulau Burung berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK No. 625/Milk/Setjen/Pla.2/8/2019 telah berubah fungsi kawasan mulai dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam. Aspirasi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan masyarakat desa di Pulau Burung menjadi dasar perubahan fungsi kawasan tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat menyadari adanya potensi bernilai ekonomis pada kawasan berekosistem hutan mangrove yang mampu menyejahterahkan di sekitar. Lokasi kawasan yang sudah menjadi Taman Wisata Alam masih belum diketahui pendapat masyarakat yang hidup di dalamnya. Hal ini perlu dikaji sebagai dasar pengembangan suatu kawasan berdasarkan persepsi masyarakat yang tinggal berdekatan pada kawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Desa Pulau Burung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Desa Pulau Burung berada pada wilayah Cagar Alam yang sudah berubah fungsi menjadi Taman Wisata Alam Pulau Burung. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. Penelitian dilakukan selama 2 bulan meliputi persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan pembuatan laporan hasil. Obyek penelitian adalah masyarakat yang tinggal di Desa Pulau Burung dan masuk ke dalam wilayah Taman Wisata Alam Pulau Burung dan Pulau Sewangi. Alat yang digunakan adalah: kuesioner, peta lokasi, kamera, alat tulis menulis, dan laptop.



Gambar 1. Peta Situasi Taman Wisata Pulau Burung

Populasi yang diambil sampelnya untuk penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Pulau Burung. Sampel penelitian diambil menggunakan metode *Random Sampling* dengan cara melakukan pengundian acak berdasarkan nomor rumah. Sampel yang diambil sebesar 25% dari jumlah kepala keluarga sebanyak 30 responden, kemudian dilakukan wawancara dengan menggunakan

kuesioner. Pengukuran variable komponen sikap menggunakan konsep dari Bakhdal dan Sinaga (1994), yang mana kategori tanggapan atas setiap kegiatan dalam penelitian ini adalah tanggapan yang mencerminkan sikap terhadap program kegiatan pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Burung. Skor penilaian terdiri dari skor 1 (tidak setuju), skor 2 (ragu-ragu), dan skor 3 (setuju).



Gambar 2. Wawancara dengan Masyarakat Desa Pulau Burung

Pengolahan data sikap menurut prinsip Bakhdal dan Sinaga (1994) didasarkan pada tanggapan-tanggapan terhadap setiap program kegiatan pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Burung dengan skor-skor yang telah disebutkan sebelumnya. Penilaian dari total skor dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sikap Positif
[total skor bernilai $(2n+1) \rightarrow 3n$]
- b. Sikap Netral
[total skor bernilai $2n$]
- c. Sikap Negatif
[total skor bernilai $n \rightarrow (2n-1)$]

Keterangan : n adalah variable dari setiap kegiatan program pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Burung, yang terdiri atas perubahan fungsi dari cagar ke taman wisata alam (1 item variabel), keterlibatan beberapa pihak dalam pengelolaan (4 item variabel), pembagian blok-blok pengelolaan (5 item

variabel), peletakan posisi blok-blok pengelolaan (5 item variabel), dan kesediaan masyarakat secara aktif akan menjaga blok-blok pengelolaan yang telah ditetapkan (5 item variabel).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden.

1. Umur

Secara biologis umur dapat mempengaruhi kemampuan fisik seseorang untuk bekerja dan berpikir dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dari hasil penelitian distribusi jumlah dan persentase responden menurut umurnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Jumlah Dan Persentase Responden Menurut Umur

Umur (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
20 – 29	2	6,66
30 – 39	10	33,33
40 – 50	8	26,66
> 50	10	33,33
Total	30	100

Data Tabel 1 menunjukkan responden yang berumur 30 – 39 tahun sebesar 33,33% berada pada posisi teratas, disusul yang berumur 40 – 50 tahun 26,66 %, dan yang berumur lebih dari

50 tahun sebesar 33,33%, kemudian yang terakhir responden yang berumur 20 – 29 tahun sebesar 6,66%.

2. Pendidikan

Tabel 2. Distribusi Jumlah Dan Persentase Responden Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tidak Sekolah	2	6,66
Tidak Tamat SD	5	16,66
Tamat SD	13	43,33
Tamat SLTP	3	10,00
Tamat SLTA	7	23,33
Total	30	100

Dari data pada Tabel 2 terlihat bahwa jumlah responden yang berpendidikan tamat SD paling banyak, yakni sebesar 43,33 %, disusul yang tamat SLTA 23,33 %, berikutnya yang tidak tamat SD sebesar 16,66 %, dan kemudian yang tidak sekolah sebesar 6,66 %.

Sianturi (2007) mengemukakan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat sikapnya, demikian sebaliknya.

3. Mata Pencaharian.

. Tabel 3. Distribusi Jumlah Dan Persentase Responden Menurut Mata Pencarian

Mata Pencaharian	Jumlah Responden	Persentase
Swasta	4	13,33
Nelayan	22	33,33
Petani	2	6,66
Pedagang	1	3,33
Buruh	1	3,33
Total	30	100

Dari Tabel 3 terlihat bahwa sebagian besar responden bermata pencaharian sebagai nelayan (33,33%), swasta sebesar 13,33 %,

petani 6,66 %, dan pedagang serta buruh masing-masing sebesar 3,33%.

4. Pendapatan

Tabel 4. Distribusi Jumlah Dan Persentase Responden Menurut Pendapatan Rata-Rata Per Bulan

Pendapatan (Rp/Bulan)	Jumlah Responden	Persentase (%)
≤ 500.000	3	10,00
> 500 – 1.000.000	21	70,00
> 1.000.000 – 2.000.000	4	13,33
> 2.000.000	2	6,66
Total	30	100

Tabel 4 menunjukkan responden yang berpendapatan per bulan lebih dari Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-

paling banyak, yaitu sebesar 70,00 %, yang pendapatannya lebih dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- sebanyak

13,33 %, yang pendapatannya lebih kecil atau sama dengan Rp. 500.000,- sebesar 10,00 %, dan yang lebih dari Rp. 2.000.000 hanya 6,66 %. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan suatu rumah tangga (Khususiyah *et al*, 2010).

Sikap Masyarakat

Menurut Triyanto, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud adalah kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila, individu dihadapkan pada stimulus yang harus

direspons. Thurstone mendefinisikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis (Simamora, 2004 dalam Mulyanti dan Fachrurazi, 2016). Berdasarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan/pernyataan yang berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam tersebut yang diolah dengan rumus Baghdal dan Sinaga (1994), maka diperoleh gambaran sikap masyarakat terhadap program pemerintah yang sedang berlangsung di desa mereka bermukim. Tanggapan responden terhadap perubahan Cagar Alam Pulau Burung menjadi Taman Wisata Alam dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap Perubahan Fungsi Cagar Alam Pulau Burung Menjadi Taman Wisata Alam

No	Uraian	Tanggapan Responden					
		Setuju		Tidak Setuju		Tidak Berpendapat	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tanggapan masyarakat terhadap perubahan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam	29	96,66	0	0	1	3,33

Dari Tabel 5 diperoleh gambaran bahwa tanggapan responden terhadap perubahan fungsi dari Cagar Alam Pulau Burung menjadi Taman Wisata Alam tidak ada yang tidak setuju, sebaliknya cenderung setuju, karena 96,66 % menyetujui adanya perubahan fungsi tersebut, hanya 3,33 % yang tidak berpendapat. Responden yang tidak

berpendapat ini disebabkan mereka tidak mengetahui adanya perubahan fungsi dari kawasan.

Sikap masyarakat terhadap program-program tersebut disajikan pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Sikap Terhadap Perubahan Fungsi Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam

Kategori Sikap	Jumlah Responden (orang)	Persentase
Positif	29	96,66
Netral	1	3,33
Negatif	0	0
Jumlah	30	100

Tanggapan responden terhadap item-item keterlibatan beberapa lembaga pada kondisi

pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Burung disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Tanggapan Responden Terhadap Keterlibatan Beberapa Lembaga Dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Burung

No	Uraian	Tanggapan Responden					
		Setuju		Tidak Setuju		Tidak Berpendapat	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Keterlibatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Selatan	29	96,66	0	0	1	3,33
2	Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	29	96,66	0	0	1	3,33
3	Keterlibatan pihak Swasta	25	83,33	1	3,33	4	13,33
4	Keterlibatan masyarakat setempat	29	96,66	0	0	1	3,33

Tabel 8. Sikap Terhadap Keterlibatan Beberapa Pihak Dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Burung.

Kategori Sikap	Jumlah Responden (orang)	Persentase
Positif	29	96,66
Netral	1	3,33
Negatif	0	0
Jumlah	30	100

Dari Tabel 8 diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden cenderung menyetujui keterlibatan lembaga-lembaga yang telah disebutkan, hanya satu responden yang tidak setuju, ketidaksetujuan satu responden ini disebabkan karena yang bersangkutan berpendapat bahwa jika pihak swasta yang terlibat dikhawatirkan akan mengurangi kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat di kawasan tersebut, kemudian hanya 3,33 % yang tidak berpendapat terhadap keterlibatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Selatan, keterlibatan

Kabupaten Tanah Bumbu, dan keterlibatan masyarakat setempat, serta hanya 13,33 % yang tidak berpendapat terhadap keterlibatan pihak swasta. Penyebab para responden yang tidak berpendapat ini adalah semata-mata mereka tidak atau belum tahu atau belum memahami peran dan fungsi daripada lembaga-lembaga yang terlibat tersebut.

Sikap responden terhadap adanya beberapa blok-blok dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Burung dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Sikap Responden Terhadap Adanya Beberapa Blok Dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Burung

Kategori Sikap	Jumlah Responden (orang)	Persentase
Positif	29	96,66
Netral	1	3,33
Negatif	0	0
Jumlah	30	100

Tanggapan responden terhadap item-item letak blok pengelolaan Taman Wisata Alam

Pulau Burung disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Tanggapan Responden Terhadap Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Burung

No	Uraian	Tanggapan Responden					
		Setuju		Tidak Setuju		Tidak berpendapat	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Letak Posisi Blok Perlindungan	25	83,33	0	0	5	16,66
2	Letak Posisi Blok Pemanfaatan	26	86,66	0	0	4	13,33
3	Letak Posisi Blok Khusus	23	76,66	1	3,33	6	20
4	Letak Posisi Blok Tradisional	26	86,66	0	0	4	13,33
5	Letak Posisi Blok Rehabilitasi	26	86,66	0	0	4	13,33

Dari yang diperoleh pada Tabel 10 menunjukkan gambaran bahwa sebagian besar responden cenderung menyetujui letak posisi blok-blok pengelolaan, hanya 3,33 % yang tidak setuju terhadap letak posisi Blok Khusus, serta hanya 13,33 % yang tidak berpendapat terhadap letak posisi Blok Pemanfaatan, Blok Tradisional, dan Blok Rehabilitasi. Kemudian hanya 16,66 % yang tidak berpendapat terhadap letak posisi Blok

Perlindungan, dan 20,00 % tidak berpendapat terhadap letak posisi Blok Khusus. Adanya responden yang tidak setuju dan tidak berpendapat ini juga disebabkan ketidak tahuan atau ketidak pahaman mereka terhadap pertimbangan letak posisiblok pengelolaan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai KSDA Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 11. Sikap Responden Terhadap Letak Posisi Blok-Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Burung.

Kategori Sikap	Jumlah Responden (orang)	Persentase
Positif	27	90
Netral	3	10
Negatif	0	0
Jumlah	30	100

Tanggapan responden terhadap item-item harapan masyarakat akan ikut berpartisipasi menjaga eksistensi blok-blok pengelolaan

Taman Wisata Alam Pulau Burung dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Menjaga Blok-Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Burung

No	Uraian	Tanggapan Responden					
		Setuju		Tidak Setuju		Tidak Berpendapat	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Blok Perlindungan	26	86,66	0	0	4	13,33
2	Blok Pemanfaatan	26	86,66	0	0	4	13,33
3	Blok Khusus	23	76,66	1	3,33	6	20,00
4	Blok Tradisional	26	86,66	0	0	4	13,33
5	Blok Rehabilitasi	26	86,66	0	0	4	13,33

Tabel 12 memberikan gambaran bahwa responden cenderung menyetujui keterlibatan mereka untuk berpartisipasi menjaga kelestarian blok pengelolaan pada Taman Wisata Alam Pulau Burung yang sudah ditetapkan, meskipun terdapat 3,33 % yang tidak setuju terhadap Blok Khusus, serta 13,33 % tidak berpendapat terhadap Blok Perlindungan, Blok Tradisional, Blok

Rehabilitasi Blok Pemanfaatan, serta 20% tidak berpendapat terhadap Blok Khusus. Responden yang tidak setuju dan yang tidak berpendapat penyebabnya juga karena tidak mengerti atau tidak memahami manfaat dan pentingnya ikut berpartisipasi untuk menjaga eksistensi pada blok pengelolaan di kawasan taman wisata alam tersebut.

Tabel 13. Sikap Responden Terhadap Partisipasi Menjaga Blok-Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Burung

Kategori Sikap	Jumlah Responden (orang)	Persentase
Positif	26	86,66
Netral	4	13,33
Negatif	0	0
Jumlah	30	100

Tabel 14. Tanggapan Responden Terhadap Tidak Diperkenankannya Penambahan Kepala Keluarga atau Pemukiman di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Burung

No	Uraian	Tanggapan Responden					
		Setuju		Tidak Setuju		Tidak Berpendapat	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tanggapan terhadap tidak diperkenankan menambah Kepala Keluarga atau pemukiman di kawasan Taman Wisata Alam Pulau Burung	12	40	0	0	18	60

Dari Tabel 14 diperoleh gambaran bahwa sebanyak 60 % responden tidak berpendapat terhadap larangan atau tidak

diperkenankannya mereka untuk menambahkan jumlah Kepala Keluarga atau pemukiman di kawasan Taman Wisata Alam

Pulau Burung, dan sebanyak 40 % menyetujuinya. Banyaknya responden tidak berpendapat (60 %) ini menunjukkan ada

sesuatu di benak mereka tentang tidak bolehnya mereka untuk menambah pemukiman di kawasan tersebut.

Tabel 15. Sikap Responden Terhadap Tidak Diperkenankannya Menambah Kepala Keluarga atau Pemukiman di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Burung

Kategori Sikap	Jumlah Responden (orang)	Persentase
Positif	12	40
Netral	18	60
Negatif	0	0
Jumlah	30	100

Dari tabel-tabel data tentang sikap diperoleh gambaran bahwa tidak satupun responden yang bersikap negatif, sebaliknya cenderung bersikap positif baik terhadap berubahnya fungsi kawan Cagar Alam Pulau Burung menjadi Taman Wisata Alam, terhadap keterlibatan beberapa lembaga dalam pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Pulau Burung, terhadap adanya beberapa blok pengelolaan, terhadap letak posisi blok-blok pengelolaan, terhadap partisipasi yang diharapkan dari masyarakat setempat untuk menjaga keberadaan dan kelestarian blok-blok pengelolaan, maupun terhadap tidak diperkenankannya masyarakat untuk menambah jumlah Kepala Keluarga atau pemukiman di kawasan Taman Wisata Alam Pulau Burung. Hanya saja khusus untuk sikap terhadap tidak diperkenankannya masyarakat menambah pemukiman di kawasan yang bersangkutan, terlihat adanya kecenderungan responden lebih cenderung bersikap netral (60 %) dan hanya 40 % yang bersikap positif.

Adanya sikap netral dari 60 % responden tersebut memberikan gambaran bahwa sikap ini merupakan manifestasi adanya keinginan masyarakat jika memungkinkan untuk menambah Kepala Keluarga atau pemukiman di kawasan Taman Wisata Alam tersebut, namun mereka meyakini bahwa kawasan tersebut adalah lahan negara yang tidak memungkinkan untuk memenuhi harapan mereka.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa yang menyebabkan sikap masyarakat cenderung positif terhadap penetapan fungsi cagar alam pulau burung disebabkan oleh tingkat pengetahuan masyarakat yang tinggi tentang hutan desa sehingga mereka bersikap baik terhadap kawasan Cagar Alam. Hal ini dapat

dibuktikan dengan masyarakat Desa Pulau Burung yang sangat kooperatif dan bersedia diajak diskusi mengenai Cagar Alam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Masyarakat Desa Pulau Burung bersikap positif terhadap adanya perubahan fungsi kawasan dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam. Masyarakat Desa Pulau Burung juga bersikap positif terhadap berbagai bentuk blok pengelolaan Taman Wisata Alam di areal pemukimannya

Saran

Sikap positif yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Pulau Burung terhadap pengelolaan dan bentuk-bentuk pengelolaan di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Burung merupakan modal awal atau kekuatan yang harus dipertahankan dan dikembangkan untuk pengelolaan taman wisata alam bersangkutan ke depannya dengan cara membina masyarakat setempat melalui penyuluhan agar masyarakat semakin sadar dan tahu tentang perlunya Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Burung tersebut menjadi beberapa blok-blok, yaitu blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok khusus, blok tradisional, dan blok rehabilitasi dalam upaya mencapai tujuan pelestarian ekosistem hutan mangrove yang ada sekaligus memberikan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat yang telah menjadi bagian dari ekosistem atau kawasan taman wisata alam tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhdal & Sinaga. 1994. Sikap Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Cagar Alam Gunung Mutis NTT. Jurnal.
- Karunianti, A. 2019. Cagar Alam: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Sejarah, dan Daftar Cagar Alam. Online : <https://foresteract.com/cagar-alam/>
- Khususiyah, N, Buana, Y, & Suyanto. 2010. Hutan Kemasyarakatan (HKm): Upaya Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Petani Miskin di Sekitar Hutan. Konsepsi World Agroforestry Centre, Konsepsi NTB. Mataram-NTB.
- Mulyanti, K. & A. Fachrurrozi 2016. Analisis Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Bank Sampah (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Bahagia Bekasi Utara). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan "OPTIMAL"* 10(2):185-198
- Sianturi, J. 2007. *Sikap dan Partisipasi Masyarakat Lokal Terhadap Pengembangan Wana Wisata Curung Kembar Batu Batu Layang (Studi Kasus Di Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB
- Simamora, B. 2004. Panduan Riset Perilaku Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Triyanto, H.D. 2009. *Persepsi, Motivasi, Sikap dan Perilaku Masyarakat Lokal Terhadap Keberadaan Hutan (Kasus di Kecamatan GN. Kencana, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten)*. Skripsi. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem.